

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara maupun daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara umumnya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan total barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu.

Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, berbagai ahli telah mengembangkan sejumlah teori. Solow, (2010) mengembangkan model pertumbuhan yang menekankan peran modal fisik, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Selain itu, Romer (1986) dan Lucas (1988) melalui teori pertumbuhan endogen menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari dalam sistem ekonomi itu sendiri, terutama melalui akumulasi pengetahuan dan inovasi teknologi.

Nonika *et al.*, (2026) rendahnya PDB suatu daerah dapat mengindikasikan berbagai permasalahan ekonomi yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDB menjadi tolak ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, pemahaman

terhadap faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting untuk dikaji lebih lanjut.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (2005–2024) menunjukkan tren yang relatif stabil di kisaran 4–6 persen. Meskipun sempat melambat akibat krisis keuangan global 2008 hingga turun ke 4,6 persen, perekonomian kembali stabil di kisaran 5 persen pada periode 2010–2019 yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor (BPS Indonesia, 2026). Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi hingga sekitar -2 persen. Setelah itu, pada periode 2021–2024, perekonomian Indonesia kembali pulih dengan pertumbuhan yang kembali berada di kisaran 5 persen (Nugroho, 2021).

Untuk melihat gambaran yang lebih terperinci di setiap wilayah, pengukuran serupa diterapkan pada tingkat regional melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020).

PDRB sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang merupakan nilai tambah riil barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun dasar tertentu, sehingga murni menunjukkan pertumbuhan produksi tanpa bias inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) merupakan total nilai tambah nominal barang dan jasa akhir yang dihasilkan di suatu wilayah

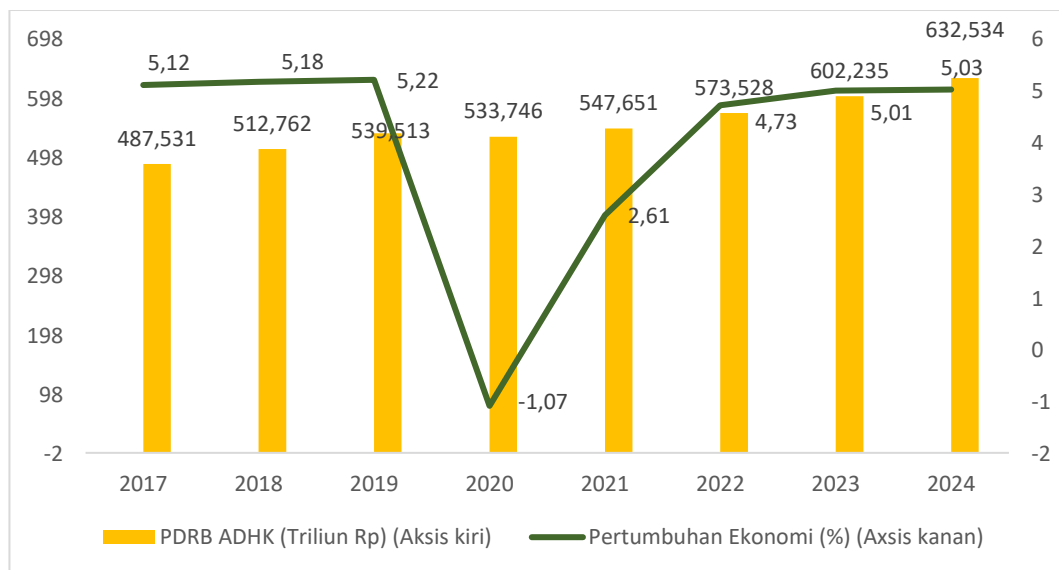
dalam periode tertentu yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan PDRB ADHK sebagai indikator utama karena lebih tepat dalam mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Provinsi Sumatera Utara selama 20 tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat. Sebagai salah satu pusat ekonomi utama di luar Pulau Jawa, Sumatera Utara berkontribusi sebesar 23,68% terhadap PDRB Pulau Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 5,01% pada tahun 2023 menjadi 5,03% pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut didukung oleh sektor unggulan, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, dan perdagangan, serta optimalisasi komoditas ekspor seperti kelapa sawit (CPO) dan produk olahan perkebunan yang berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Harahap *et al.*, 2023).

Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda sehingga pertumbuhan ekonomi antarwilayah juga bervariasi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, investasi, dan infrastruktur. Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara, sehingga analisis pertumbuhan ekonomi diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Selain menunjukkan stabilitas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Perkembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah juga memperkuat aktivitas ekonomi antarkabupaten/kota sehingga meningkatkan kemampuan perekonomian

daerah dalam beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi regional maupun nasional (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023). Berikut gambar perkembangan PDRB ADHK di Provinsi Sumatera Utara 8 tahun terakhir:



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) dan PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2024 (Triliun Rp)

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Gambar 1.1 diatas menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017–2024 cenderung menunjukkan peningkatan, di mana pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang relatif stabil, kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun 2020, dan selanjutnya kembali meningkat hingga tahun 2024. Berdasarkan grafik di atas pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,22%, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -1,07% (Bps Provinsi Sumatera Utara, 2025). Selain itu PDRB ADHK di Sumatera Utara juga menunjukkan tren pertumbuhan positif dari Tahun 2017 hingga 2024. Pada tahun 2017, nilai PDRB

tercatat sebesar 487,531 triliun rupiah. Pada tahun tersebut, beberapa kabupaten mencerminkan pertumbuhan yang relatif rendah, seperti Kabupaten Pakpak Bharat sekitar 760,55 juta rupiah, Nias Barat sekitar 1.126 miliar rupiah, Kabupaten Nias Utara sekitar 2.134 miliar rupiah, Kabupaten Nias sekitar 2.3251 miliar rupiah dan Kabupaten Samosir sekitar 2.776 miliar rupiah (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias dan Kabupaten Samosir disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, dominasi sektor primer, serta rendahnya investasi dan diversifikasi ekonomi, sehingga aktivitas ekonomi berjalan relatif lambat.

Selanjutnya, pada tahun 2018 nilai PDRB meningkat menjadi 512,762 triliun rupiah, (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2019 dengan nilai PDRB sebesar 539,514 triliun rupiah yang didorong oleh investasi mulai meningkat, infrastruktur mulai berkembang dan sektor jasa dan industri mulai tumbuh namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB menjadi 533,746 triliun rupiah yang disebabkan oleh tekanan eksternal berupa pandemi COVID-19, yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Selanjutnya, pada tahun 2021 PDRB kembali mengalami peningkatan menjadi 547,651 triliun rupiah sebagai indikasi awal pemulihan ekonomi yang didorong oleh pelonggaran pembatasan aktivitas serta berbagai stimulus kebijakan pemerintah (bantuan sosial).

Pemulihan ekonomi terus berlanjut pada tahun 2022 dengan peningkatan PDRB menjadi 573,529 triliun rupiah, yang didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan kinerja sektor usaha. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai PDRB mencapai 602,236 triliun rupiah, mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi pasca pandemi. Hingga tahun 2024, PDRB terus menunjukkan peningkatan menjadi 632,535 triliun rupiah, yang mengindikasikan kondisi ekonomi yang semakin stabil serta didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspansi sektor-sektor unggulan daerah beberapa Kabupaten mencerminkan pertumbuhan yang relatif tinggi, seperti Kota Medan sekitar 182.242,59 miliar rupiah, Kabupaten Deli Serdang sekitar 83.868,36 miliar rupiah, Kabupaten Langkat sekitar 34.880,49 miliar rupiah, Kabupaten Simalungun sekitar 33.052,35 triliun rupiah dan Kabupaten Asahan sekitar 31.341,30 miliar rupiah (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Asahan disebabkan oleh dominasi sektor industri, perdagangan, serta dukungan infrastruktur yang memadai sehingga mampu menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi regional.

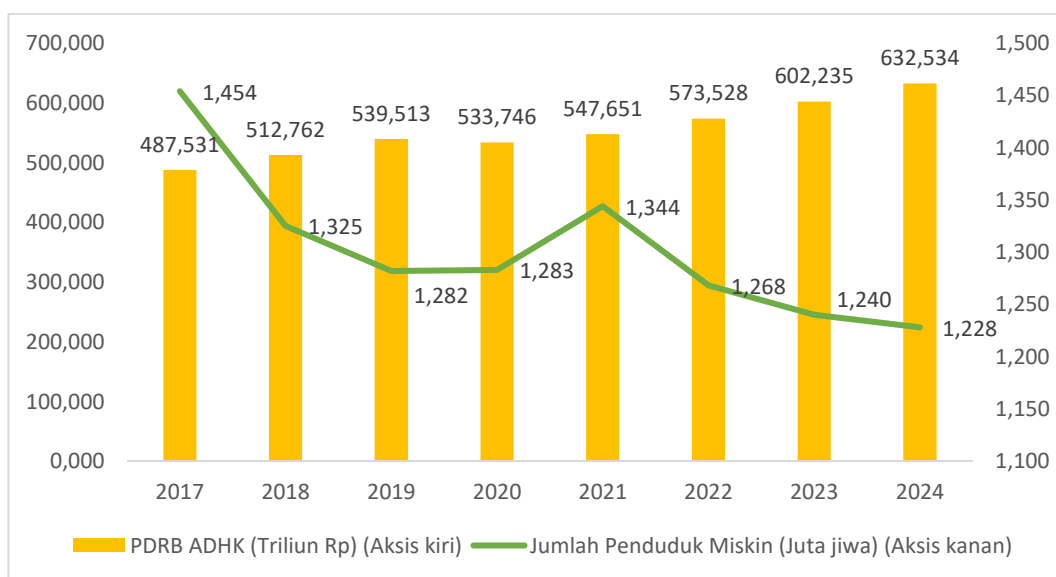
Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Nilai PDRB yang terus meningkat mencerminkan bahwa produksi barang dan jasa mengalami pertumbuhan. Namun demikian, peningkatan tersebut belum tentu sepenuhnya menggambarkan bahwa seluruh masyarakat telah merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Dalam kenyataannya, masih terdapat sebagian masyarakat yang hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi atau kemiskinan. Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan (BPS Indonesia, 2024) yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk melihat perkembangan tingkat kemiskinan guna mengetahui sejauh mana hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Nurkse, (1958) juga menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi akibat adanya lingkaran setan kemiskinan. Dalam teori ini, tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi, sehingga produktivitas pun ikut tetap rendah. Selain itu Todaro dan Smith, (2011) dalam *Economic Development* memandang kemiskinan sebagai fenomena multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tersebut, kemiskinan dapat dipahami sebagai permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana fenomena kemiskinan terjadi secara nyata pada tingkat daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan tingkat pembangunan yang berbeda, sehingga fenomena kemiskinan yang terjadi juga menunjukkan pola yang beragam. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kondisi dan perkembangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat keempat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 1,228 juta jiwa atau 7,99% pada tahun 2024. Selama 20 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara berfluktuasi namun cenderung menurun dan berada di bawah rata-rata nasional, meskipun jumlah penduduk miskin masih melebihi satu juta jiwa (BPS Indonesia, 2024). Karakteristik kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara juga ditandai oleh adanya perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dimana tingkat kemiskinan di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Berikut gambar Jumlah Penduduk Miskin dan PDRB ADHK di Provinsi Sumatera Utara dalam 8 tahun terakhir:



Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin (Juta jiwa) dan PDRB ADHK (Triliun Rp) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Gambar 1.2 diatas menggambarkan bahwa kemiskinan di Sumatera Utara menunjukkan tren fluktuatif namun secara umum cenderung menurun. Pada tahun 2017, kemiskinan tercatat sebesar 1,454 juta jiwa dengan tingkat PDRB tercatat

sebesar 487,531 triliun rupiah. Kondisi ini mencerminkan tahap awal pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan belum sepenuhnya tercapai, sehingga tingkat kemiskinan masih relatif tinggi (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Sumatera Utara yaitu Kota Medan 204,22 ribu jiwa, Kabupaten Langkat 114,41 ribu jiwa, Kabupaten Deli Serdang 97,09 ribu jiwa, Kabupaten Simalungun 91,35 ribu jiwa dan Kabupaten Asahan 83,67 ribu jiwa. Tingginya jumlah penduduk miskin di daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk yang dimiliki serta masih adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan ekonomi dan arus urbanisasi menyebabkan jumlah penduduk miskin secara absolut tetap tinggi meskipun aktivitas ekonomi daerah berkembang pesat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya PDRB tidak selalu diikuti oleh rendahnya jumlah penduduk miskin.

Memasuki tahun 2018, kemiskinan turun secara konsisten menjadi 1,325 juta jiwa diikuti dengan peningkatan PDRB menjadi 512,763 triliun rupiah. Penurunan ini dapat disebabkan oleh mulai meningkatnya aktivitas perekonomian, penciptaan lapangan kerja, serta perbaikan daya beli masyarakat (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Pada tahun 2019, kemiskinan turun menjadi 1,282 juta jiwa dan PDRB kembali naik menjadi 533,744 triliun rupiah. Penurunan tingkat kemiskinan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga manfaatnya dirasakan oleh kelompok masyarakat bawah.

Namun, pada tahun 2020, kemiskinan justru meningkat menjadi 1,283 juta jiwa meskipun PDRB masih meningkat menjadi 533,746 triliun rupiah (relatif stagnan). Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, peningkatan kemiskinan, serta penurunan pendapatan masyarakat (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Pada tahun 2021, kemiskinan masih meningkat menjadi 1,344 juta jiwa dan PDRB mulai pulih menjadi 547,652 triliun rupiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak disertai dengan menurunnya kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, ketimpangan distribusi pendapatan, serta struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor-sektor yang tidak menyerap tenaga kerja secara luas, sehingga peningkatan output ekonomi tidak secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, pada tahun 2022 kemiskinan menurun menjadi 1,268 juta jiwa diikuti dengan PDRB meningkat cukup signifikan menjadi 573,529 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi, didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Pada tahun 2023, kemiskinan menurun menjadi 1,240 juta jiwa diikuti dengan PDRB meningkat menjadi 602,236 triliun rupiah yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara kembali berdampak pada menurunnya kemiskinan. Pada tahun 2024, kemiskinan kembali turun menjadi 1,228 juta jiwa dan PDRB meningkat menjadi 632,535 triliun rupiah. Tren ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian semakin membaik, dan manfaat pertumbuhan mulai menyebar secara lebih merata kepada masyarakat. Kabupaten/kota dengan jumlah

penduduk miskin terendah di Provinsi Sumatera Utara umumnya merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang relatif kecil seperti Kabupaten Pakpak Bharat 3,73 ribu jiwa, Kota Sibolga 9,99 ribu jiwa, Kota Binjai 13,86 ribu jiwa, Kabupaten Samosir 14,85 ribu jiwa dan Kota Padangsidempuan 14,88 ribu jiwa. Rendahnya jumlah penduduk miskin di daerah-daerah tersebut karena ukuran populasi yang lebih kecil dibandingkan daerah lain di Provinsi Sumatera Utara, bukan semata-mata karena kondisi kesejahteraan yang lebih baik.

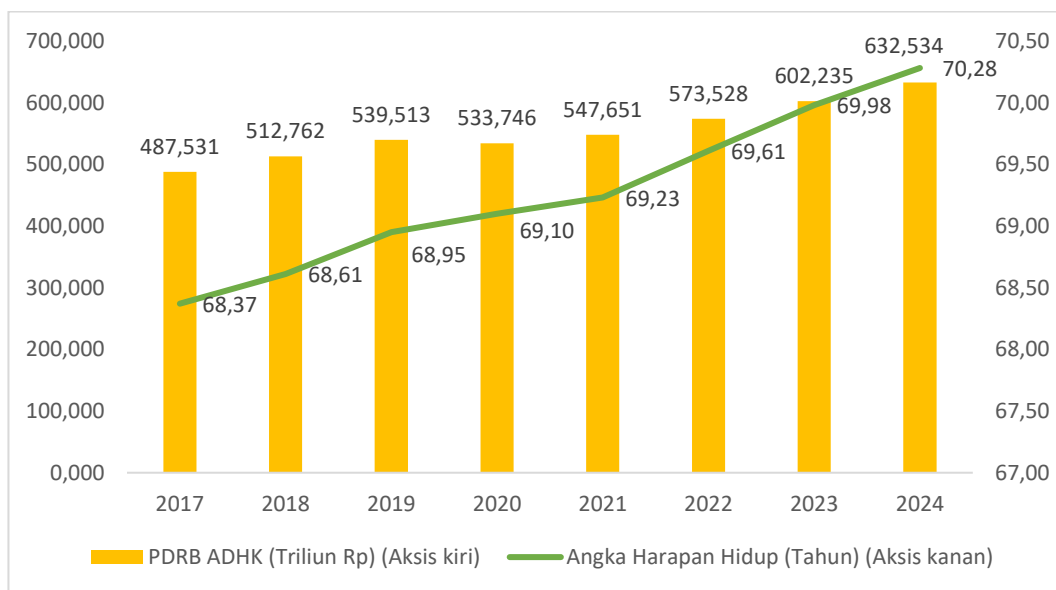
Secara umum, penurunan kemiskinan pada periode 2017–2024 diikuti oleh peningkatan PDRB, kecuali pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung berkaitan dengan penurunan kemiskinan, meskipun dipengaruhi oleh kualitas pertumbuhan, distribusi pendapatan, dan guncangan ekonomi.

Selain tantangan pengentasan kemiskinan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang merata juga sangat bergantung pada ketahanan fisik sumber daya manusia, kesehatan berperan penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji adalah Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki dinamika pembangunan kesehatan yang cukup beragam antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, analisis perkembangan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara menjadi penting untuk memahami sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi perhatian

meskipun menunjukkan tren penurunan. Penyakit menular seperti tuberkulosis (TB), malaria, dan diare masih banyak ditemukan, terutama di daerah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas. Selain itu, prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung juga terus meningkat. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kesenjangan pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Sumatera Utara (Dinas Kesehatan Sumatera Utara, 2024).

Aspek kesehatan dalam penelitian ini diproyeksikan melalui Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan usia yang dicapai oleh penduduk sehingga sering digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat secara umum. Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Sumatera Utara selama 20 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang relatif konsisten setiap tahunnya. Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek, seperti akses terhadap layanan kesehatan, kualitas gizi, sanitasi lingkungan, serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Oleh karena itu, Angka Harapan Hidup (AHH) tidak hanya menggambarkan kondisi kesehatan, tetapi juga mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah (BPS Indonesia, 2023). Berikut gambar perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) dan PDRB ADHK di Provinsi Sumatera Utara dalam 8 tahun terakhir:



Gambar 1. 3 Angka Harapan Hidup (Tahun) dan PDRB ADHK (Triliun Rp) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pada Gambar 1.3 diatas menunjukkan Tren yang meningkat, meskipun terdapat perlambatan pada periode tertentu. Pada tahun, 2017 Angka Harapan Hidup (AHH) tercatat sebesar 68,37 tahun dengan PDRB ADHK tahun 2017 tercatat sebesar 487,531 triliun rupiah. Kondisi ini mencerminkan tahap awal pertumbuhan ekonomi yang mulai stabil, diiringi dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui akses layanan kesehatan dasar. Kabupaten/kota dengan Angka Harapan Hidup (AHH) relatif rendah yaitu Kabupaten Padang Lawas 71,52 tahun, Kabupaten Nias Selatan 71,61 tahun, Kabupaten Tapanuli Selatan 71,61 tahun, Kabupaten Mandailing Natal 71,72 tahun dan Kabupaten Nias 71,74 tahun (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) di daerah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, baik dari segi jumlah maupun

kualitas layanan, serta kondisi geografis yang relatif sulit dijangkau, khususnya di wilayah kepulauan seperti Nias.

Pada tahun 2018, Angka Harapan Hidup (AHH) naik menjadi 68,61 tahun diiringi dengan PDRB meningkat menjadi 512,763 triliun rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan gizi juga meningkat (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Tren ini berlanjut pada tahun 2019 dengan Angka Harapan Hidup (AHH) 68,95 tahun dan PDRB sebesar 535,164 triliun rupiah, yang menunjukkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu 69,10 tahun, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan PDRB yang hanya mencapai 533,746 triliun rupiah. Kondisi ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi secara signifikan (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Meskipun demikian, Angka Harapan Hidup (AHH) tetap meningkat karena adanya intervensi pemerintah di sektor kesehatan, seperti peningkatan layanan kesehatan dan program penanganan pandemi.

Selanjutnya, pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup (AHH) naik menjadi 69,23 tahun dan PDRB juga kembali meningkat menjadi 547,652 triliun rupiah (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Pemulihan ekonomi pasca pandemi mulai terlihat, didukung oleh adaptasi masyarakat terhadap kondisi baru serta percepatan program vaksinasi yang turut menjaga stabilitas kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat sebesar 69,61 tahun dengan peningkatan PDRB yang cukup signifikan mencapai 573,529 triliun rupiah (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi berjalan lebih optimal dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Pada tahun 2023, tren positif masih berlanjut dengan Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 69,98 tahun dan PDRB sebesar 603,855 triliun rupiah. Peningkatan ini mencerminkan kondisi ekonomi yang semakin stabil serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

Terakhir, pada tahun 2024 Angka Harapan Hidup (AHH) tercatat sebesar 70,28 tahun dengan PDRB mencapai 632,535 triliun rupiah (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, termasuk dalam memperpanjang usia harapan hidup. Kabupaten/kota dengan Angka Harapan Hidup (AHH) relatif tinggi didominasi oleh wilayah perkotaan, seperti Kota Medan 74,76 tahun, Kota Pematang Siantar 74,75 tahun, Kota Binjai 74,18 tahun, Kabupaten Karo 74,16 tahun, dan Kota Sibolga 74,02 tahun (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) di wilayah tersebut umumnya disebabkan oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, seperti rumah sakit dan tenaga medis yang memadai, serta akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat juga relatif lebih tinggi, didukung oleh kondisi

ekonomi yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

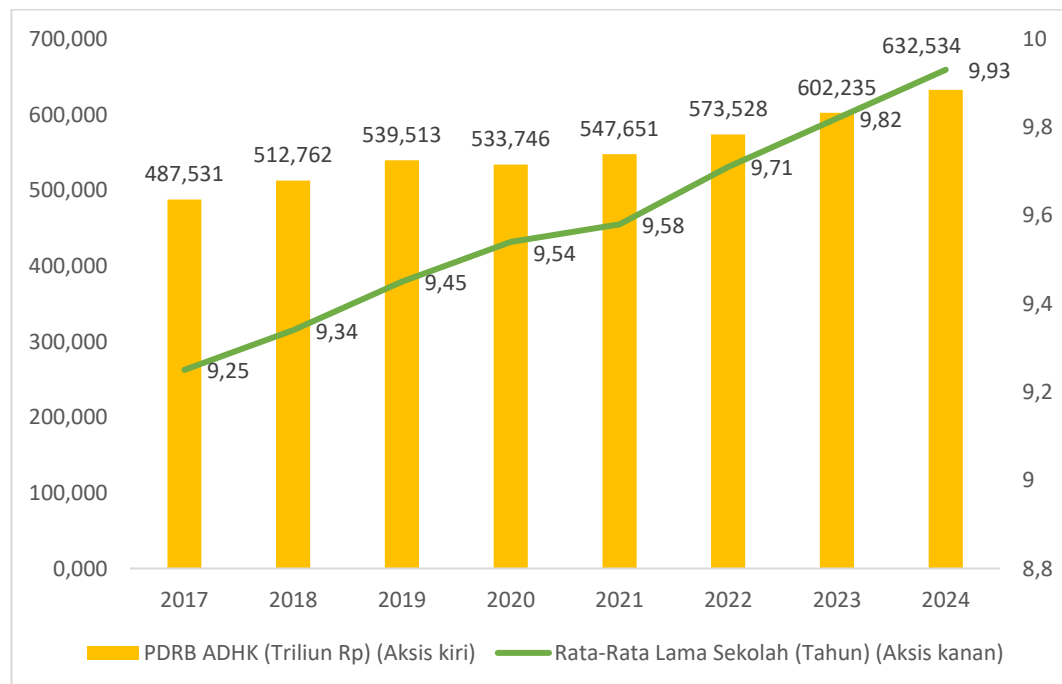
Di samping kesehatan, pendidikan merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas modal manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Becker (1975), pendidikan dan kesehatan merupakan investasi modal manusia yang mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta efektivitas tenaga kerja, sehingga mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam penelitian ini pendidikan diproksikan dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) yang mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. RRLS juga sebagai indikator fundamental yang membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakatnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada tidak melakukannya. Dengan kata lain, investasi terhadap sumber daya manusia melalui kemajuan pendidikan akan menghasilkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Becker, 1975).

Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) di Provinsi Sumatera Utara selama 20 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pendidikan formal (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024). Menurut Piqqa *et al.*, (2022), peningkatan investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan mampu meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, yang selanjutnya mendorong produktivitas serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Semakin tinggi Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS), semakin besar peluang masyarakat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan RRLS di Provinsi Sumatera Utara penting dikaji sebagai indikator kualitas sumber daya manusia. Berikut ini perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) dan PDRB ADHK di Provinsi Sumatera Utara 8 tahun terakhir dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 4 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) dan PDRB ADHK (Triliun Rp) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pada Gambar 1.4 diatas menunjukkan Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terlihat menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama tahun 2017–2024. Pada tahun

2017, Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) tercatat sebesar 9,25 tahun dengan PDRB sebesar 487,531 triliun rupiah (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Kondisi ini mencerminkan tingkat pendidikan masyarakat yang masih berada pada jenjang pendidikan menengah pertama, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Kabupaten/kota dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) relatif rendah yakni Kabupaten Nias 6,40 tahun, Kabupaten Nias Utara 7,05 tahun, Kabupaten Nias Barat sekitar 7,1 tahun, Kabupaten Mandailing Natal sekitar 8,3 tahun, dan Kabupaten Padang Lawas sekitar 8,4 tahun. Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) di daerah tersebut disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, baik dari segi jumlah sekolah maupun kualitas tenaga pendidik. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau, terutama di wilayah kepulauan seperti Nias, menjadi hambatan utama dalam pemerataan pendidikan. Faktor ekonomi juga berperan penting, di mana tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan angka putus sekolah. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di beberapa daerah juga turut mempengaruhi rendahnya capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS).

Pada tahun 2018, Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) meningkat menjadi 9,34 tahun dan PDRB juga naik menjadi 512,763 triliun rupiah (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya akses pendidikan serta pertumbuhan ekonomi yang mendorong kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2019, di mana RRLS mencapai

9,41 tahun dengan PDRB sebesar 535,164 triliun rupiah, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2020, Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) kembali meningkat menjadi 9,54 tahun, meskipun PDRB mengalami sedikit penurunan menjadi 533,746 triliun rupiah (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Penurunan PDRB ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi. Namun demikian, RRLS tetap meningkat karena sektor pendidikan tetap berjalan melalui sistem pembelajaran daring serta adanya kebijakan pemerintah yang menjaga keberlanjutan pendidikan.

Pada tahun 2021, Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) meningkat menjadi 9,58 tahun dan PDRB kembali naik menjadi 547,652 triliun rupiah (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang mulai terjadi pasca pandemi, yang turut mendukung keberlanjutan pendidikan masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2022, RRLS mencapai 9,71 tahun dengan PDRB sebesar 573,529 triliun rupiah, yang mencerminkan peningkatan signifikan baik dari sisi pendidikan maupun ekonomi akibat pemulihan yang semakin kuat.

Pada tahun 2023, Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) meningkat menjadi 9,82 tahun dan PDRB sebesar 603,855 triliun rupiah (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Peningkatan ini menunjukkan kondisi ekonomi yang semakin stabil serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Terakhir, pada tahun 2024, Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) mencapai 9,93 tahun dengan PDRB sebesar 632,535 triliun rupiah. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mampu

mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan, sehingga Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) terus meningkat. Kabupaten/kota dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) relatif tinggi yaitu Kota Pematangsiantar 11,82 tahun, Kota Medan 11,79 tahun, Kota Binjai 11,20 tahun, Kota Padangsidempuan 11,13 tahun, dan Kota Tebing Tinggi 10,87 tahun (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025).

Tingginya Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) di daerah tersebut didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, akses pendidikan yang mudah, kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik, serta tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan sehingga angka putus sekolah relatif rendah. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperluas kesempatan bersekolah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Kenaikan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) ini adalah cerminan dari peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi atau jenjang pendidikan yang lebih lama.

Berbagai penelitian internasional menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh kemiskinan, Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kemiskinan, penelitian di Nigeria dan Pakistan menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ilyas *et al.*, 2025; Lawanson & Umar, 2021). Dari sisi AHH, penelitian di Pakistan dan Nigeria menemukan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ilyas *et al.*, 2025; Lawanson & Umar, 2021). Dari sisi RRLS, penelitian di negara-negara terpilih secara global, Pakistan, India, dan 26 negara bagian India menemukan hasil berpengaruh positif

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Alam, 2023; Baya *et al.*, 2024; Ilyas *et al.*, 2025; Shrawan, 2024).

Berbagai penelitian nasional menunjukkan bahwa kemiskinan, AHH, dan RRLS cenderung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, meskipun beberapa penelitian menegaskan hasil yang berbeda. Dari sisi kemiskinan, penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Aceh, Indonesia, Provinsi D.I Yogyakarta, Kabupaten Bone, dan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Candra, 2024; Harman *et al.*, 2022; Nabila, 2024; Pane & Yarham, 2023; Pratama & Supriadin, 2025; Putriana & Aji, 2022), sedangkan penelitian di Provinsi Sulawesi Utara menemukan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Somba *et al.*, 2021).

Dari sisi AHH, penelitian di Indonesia, Pulau Jawa, Kabupaten Tapin, serta China, India, Indonesia, Pakistan, dan Amerika Serikat menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Akasumbawa *et al.*, 2021; Alrivaldi & Sihaloho, 2023; Hanifa, 2021; Maulida & Saleh, 2023), sedangkan penelitian di Kabupaten Bone menemukan bahwa AHH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Harman *et al.*, 2022). Dari sisi RRLS, penelitian di Jawa Tengah, Indonesia, Provinsi D.I Yogyakarta, Kabupaten Tapin, serta China, India, Indonesia, Pakistan, dan Amerika Serikat menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Akasumbawa *et al.*, 2021; Alrivaldi & Sihaloho, 2023; Fauziah, 2024; Maulida & Saleh, 2023; Putriana & Aji, 2022), sedangkan penelitian di Provinsi Jawa Timur

dan Kabupaten Bone menemukan bahwa RRLS tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Harman *et al.*, 2022; Huda & Indahsari, 2021).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan hasil antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, baik pada tingkat internasional maupun nasional, sehingga menimbulkan *research gap*. Selain itu, banyak penelitian terdahulu menggunakan data yang terbatas sebelum tahun 2020 atau hanya mencakup periode awal pandemi, sehingga belum dapat menangkap fenomena pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022 hingga 2024 serta menganalisis pengaruh ketiga variabel kemiskinan, Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) secara simultan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, dapat di defenisikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh kemiskinan, Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengetahui pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
4. Mengetahui pengaruh kemiskinan, Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi ilmu pengetahuan, menjadi referensi bagi perkembangan ilmu ekonomi dan studi pembangunan yang terkait dengan pengaruh kemiskinan, Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS), terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Bagi penelitian-penelitian berikutnya, dapat dijadikan bahan referensi untuk dikembangkan lebih lanjut menyangkut pengaruh kemiskinan, Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Sumatera Utara dan Pemerintah kab/kota di Provinsi Sumatera Utara, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan keterkaitannya dengan sektor kemiskinan, kesehatan (AHH) dan Pendidikan (RRLS).
2. Bagi masyarakat, penelitian dapat menjadi pengetahuan tambahan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.